

SARANA PRASARANA PERMUKIMAN BERDASARKAN SISTEM PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Roswita Dharmasanti
rdharmasanti@gmail.com

Su Ritohardoyo
r_hardoyo@yahoo.com

Abstract

The regional spatial planning (RTRW) of Banjarnegara district in years 2011 – 2030 determines that Banjarnegara and Karangobar sub district have different urban system and development activities. The purposes of this study are to find out the settlement infrastructure differences, to evaluate its service capabilities, and to determine the adequacy level of provided infrastructure. This descriptive research used secondary and primary data in data processing with census methods. The sequential explanatory in order to produce the research findings which explain conditions and the provided infrastructures. The urban system differences impacts infrastructures in Banjarnegara and Karangobar sub district, relate to quantity, condition, and quality of the infrastructures. The affordability of service areas in Banjarnegara sub district are better than Karangobar sub district, because the road networks in this area are in a good condition. The study showed that the service ability of infrastructures in both researched areas are still less effective. Some of the provided infrastructures in both sub districts have been able to serve the society's needs in that sub district.

Key words : *affordability, infrastructure, service ability, settlement, urban system*

Abstrak

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 – 2030 menetapkan Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar memiliki sistem perkotaan dan kegiatan pengembangan yang berbeda. Perbedaan pengembangan tersebut berdampak terhadap sarana prasarana yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sarana prasarana permukiman, mengevaluasi kemampuan pelayanannya, dan mengetahui tingkat ketercukupan sarana prasarana yang ada. Penelitian deskriptif ini memanfaatkan data sekunder dan primer dalam pengolahan data dengan pendekatan keruangan untuk melihat perbedaan sarana prasarana. Analisis data berjenis *Sequential explanatory* menghasilkan kajian tentang kondisi dan bentuk sarana prasarana yang ada. Sarana prasarana di Banjarnegara dan Karangobar memiliki jumlah, kondisi, dan kualitas sarana prasarana yang berbeda. Daerah pelayanan Banjarnegara memiliki kemampuan daya jangkau yang lebih baik karena memiliki jaringan jalan dalam kondisi yang baik. Daya layanan yang diberikan oleh kedua PKL ini masih tergolong kurang efektif. Beberapa sarana prasarana yang ada di kedua kecamatan tersebut jumlahnya sudah mampu melayani kebutuhan penduduk ditingkat kecamatan.

Kata kunci : *daya jangkau, daya layanan, permukiman, sarana prasarana, sistem perkotaan*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan dan kebutuhan hidup pun semakin meningkat (Kuswartojo, 2005). Banyak penduduk yang melakukan migrasi ke kota untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan hidup. Pergerakan penduduk ke pusat kota salah satunya diakibatkan oleh adanya daya tarik yang besar di pusat kota, seperti ketersediaan fasilitas pelayanan yang lengkap (Massikki, 2005). Fenomena urbanisasi pada kota – kota besar seharusnya disertai dengan pembangunan sarana prasarana fisik dan memperbaiki struktur perkotaan yang ada, sehingga kemungkinan adanya permasalahan kota dan penurunan kemampuan daya layan sarana prasarana dapat dihindari (Klug dan Hayashi, 2012). Beban pelayanan tersebut mendasari pemerintah untuk membuat pusat kota baru sebagai pusat - pusat pelayanan penyangga sehingga kebutuhan penduduk dapat terlayani secara keseluruhan (Branch, 1995).

Secara umum, penduduk akan bermukim pada kawasan – kawasan yang merupakan pusat pelayanan permukiman dan juga kegiatan di sebuah wilayah, termasuk pada kawasan perkotaan (Massikki, 2005), sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten besar yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah setempat membangun sarana prasarana di pusat untuk melayani kebutuhan penduduk tersebut. Berdasarkan jumlah penduduk dan sarana prasarana tersebut, pemerintah menyusun dokumen RTRW. Peraturan Daerah (Perda) RTRW tahun 2011 untuk menentukan sistem perkotaan Kabupaten Banjarnegara (Pemerintah Daerah, 2011). Kecamatan Banjarnegara yang diperuntukkan untuk pusat kegiatan lokal (PKL) dikembangkan sebagai kawasan pengembangan I, sedangkan Kecamatan Karangobar yang saat ini sedang

dipromosikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL-p) masuk kedalam kawasan pengembangan III. Hal ini dapat mendasari perbedaan jumlah dan karakteristik sarana prasarana yang tersedia di dalamnya.

Bentuk sistem perkotaan yang berbeda tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan sarana prasarana di masing – masing daerah pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Berdasarkan tujuan pengembangannya, Kecamatan Banjarnegara berada di kawasan I yang dimanfaatkan untuk pusat perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan. Kecamatan Karangobar berada di kawasan pengembangan III yang diperuntukkan untuk agropolitan, dan konservasi lingkungan. Perbedaan fungsi wilayah di kedua daerah ini mempengaruhi penyediaan sarana prasarana yang dibangun.

Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi beban pelayanan yang terdapat di pusat kota kabupaten adalah dengan mengembangkan Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar untuk menjadi pusat kegiatan lokal sehingga dapat melayani kebutuhan penduduk di daerah pelayanan sekitarnya. Kecamatan Banjarnegara berfungsi untuk melayani penduduk di Kabupaten Banjarnegara bagian timur, sedangkan Karangobar digunakan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk di Kabupaten Banjarnegara bagian utara, sehingga daerah pelayanan dari kedua daerah tersebut berbeda. Perbedaan letak daerah pelayanan dapat berdampak pada perbedaan jarak dan waktu tempuh yang dimiliki oleh penduduk di masing – masing daerah pelayanan untuk menjangkau sarana prasarana yang ada di pusat pelayanan. Penduduk yang tinggal di daerah pelayanan akan memiliki daya jangkauan yang berbeda terhadap pusat pelayanan, dan sarana prasarana di masing – masing PKL pun juga memiliki daya layan yang berbeda untuk melayani penduduk

Kebutuhan sarana prasarana sebuah daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah sarana prasarana yang saat ini tersedia. Semakin sedikit jumlah sarana prasarana dan semakin banyak jumlah penduduk yang harus dilayani maka sarana prasarana yang ada semakin tidak efektif untuk melayani kebutuhan penduduk. Salah satu upaya peningkatan pelayanan bagi penduduk adalah dengan penambahan sarana prasarana. Penambahan sarana prasarana juga berfungsi untuk mengurangi beban pelayanan sarana prasarana yang terdapat di pusat kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan perbedaan sarana dan prasarana permukiman yang tersedia di Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Karangobar.
- b. Mengevaluasi daya jangkauan penduduk daerah pelayanan dan daya layan sarana prasarana di PKL Banjarnegara dan PKL-p Karangobar.
- c. Mengetahui tingkat ketercukupan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran terkait dengan sarana prasarana yang terdapat di dalam daerah kajian (Sukandarrumidi, 2002). Metode penelitian sensus dipilih agar dapat mengkaji obyek penelitian secara keseluruhan karena menggunakan semua populasi data yang ada (Yunus, 2010). Pendekatan keruangan dilakukan dalam penelitian ini agar dapat mengetahui perbedaan serta kemampuan sarana prasarana di Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar dalam memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan pembagian sistem perkotaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

Data Potensi Desa Kabupaten Banjarnegara tahun 2014, Kecamatan

dalam Angka tahun 2014, dan Kabupaten Banjarnegara dalam Angka tahun 2014 merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data statistik tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah dan ketersediaan sarana prasarana di dalam daerah. Terdapat data primer yang juga digunakan untuk mengetahui kondisi dan penggunaan sarana prasarana oleh penduduk yang dikumpulkan dengan cara melakukan kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) (Sugiyono, 2011). Wawancara dilakukan kepada pihak – pihak pemerintah yang mengetahui tentang pembangunan sarana prasarana permukiman. Variabel penelitian ini adalah jenis, jumlah, jarak, dan letak sarana prasarana; hierarki wilayah; standar pelayanan minimal; jumlah penduduk; dan jumlah sarana prasarana yang tersedia.

Obyek kajian yang diteliti adalah sarana prasarana yang terdapat di dalam dua permukiman yang memiliki struktur ruang dan sistem perkotaan yang berbeda. Analisis data dengan komparasi keruangan digunakan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan pada sarana prasarana Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar sehingga dapat diketahui upaya untuk menentukan kebijakan pengembangan wilayah (Yunus, 2010). Metode kombinasi (*sequential explanatory*) juga dilakukan dalam analisis ini karena data kuantitatif yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian kualitatif (Sarwono, 2006). Analisis tersebut digunakan untuk menghasilkan kajian tentang kondisi dan bentuk sarana prasarana yang ada.

Data sekunder yang berbentuk kuantitatif berfungsi untuk melihat perbedaan, daya dukung, dan kebutuhan dari masing – masing sarana prasarana. Data tersebut diolah dengan menggunakan perhitungan matematik untuk menghasilkan informasi. Hasil pengolahan data secara matematik tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram agar dapat mudah dipahami dan memberikan interpretasi atau penerjemahan maksud dari data yang

disajikan (Martono, 2011). Jenis data lainnya yang digunakan adalah data primer yang bertipe kualitatif. Data kualitatif tersebut dikumpulkan dengan cara pengamatan, wawancara, dan penggambaran sarana prasarana yang ada di lapangan (Patilima, 2010). Pengolahan data primer ini dilakukan dengan cara mentranskrip hasil wawancara dengan pihak terkait. Kegiatan survei lapangan langsung dilakukan untuk melihat kondisi sarana prasarana di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan mendokumentasikan sarana prasarana yang ada sebagai alat bukti lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan sistem perkotaan tersebut dapat mempengaruhi bentuk dan kondisi sarana prasarana yang ada di dalam masing – masing daerah. Ketersediaan sarana prasarana permukiman dan juga jumlah penduduk yang harus dilayani pada setiap daerah kecamatan dapat memberikan daya layan yang berbeda kepada penduduk setempat. Penempatan lokasi pusat kegiatan juga dapat mempengaruhi daya jangkau dari masing – masing daerah pelayanan yang ada di sekitar pusat kegiatan untuk menjangkau sarana prasarana yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar dapat dilihat dari jumlah, jenis, serta kondisi sarana prasarana yang tersedia pada masing – masing daerah. Perbedaan jenis sarana prasarana tersebut salah satunya dapat dilihat dengan melakukan perhitungan metode Guttman. Berdasarkan Data Potensi Desa Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 yang digunakan oleh penulis untuk melakukan perhitungan ketersediaan sarana prasarana, dapat diketahui bahwa masing – masing desa atau kelurahan yang terdapat di kedua kecamatan kajian memiliki jumlah jenis sarana prasarana yang bervariasi. Jumlah jenis sarana prasarana tersebut didasarkan pada ketersediaan variasi kelompok sarana

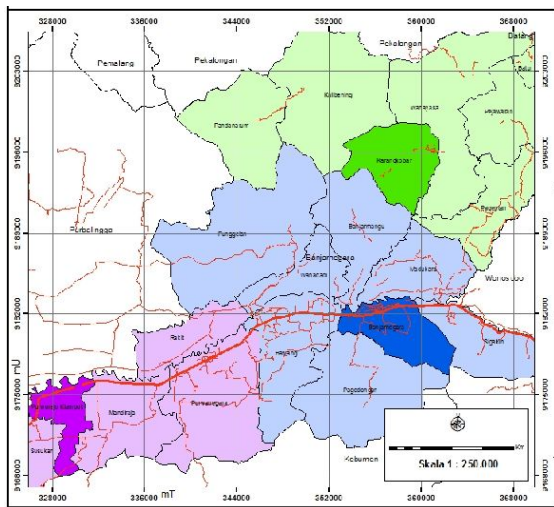
yang ada di dalam daerah untuk melayani penduduk. Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara dan Desa Leksana, Kecamatan Karangobar memiliki jumlah jenis sarana prasarana yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan kedua daerah ini merupakan pusat ibukota kecamatan dari masing – masing daerah kajian. Daerah yang menjadi pusat dari pemerintahan akan memiliki kelengkapan sarana prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Berdasarkan data Potensi Desa Kabupaten Banjarnegara tahun 2014, Kutabanjarnegara memiliki 42 jenis sedangkan Desa Karangobar hanya memiliki 24 jenis sarana prasarana saja.

Kecamatan Banjarnegara tergolong dalam hierarki kota I sedangkan Karangobar berada pada golongan IV (Pemerintah Daerah, 2011). Penentuan hierarki kota tersebut berdasarkan ketersediaan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Banjarnegara memiliki jumlah dan kondisi sarana prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan Karangobar sebab status daerahnya merupakan pusat dari pemerintahan. Status Karangobar pada hierarki IV yang ditetapkan sebagai PKL promosi mendorong pemerintah untuk menambah sarana prasarana di dalamnya sehingga dapat meningkatkan hierarki kotanya dan melayani penduduk bagian utara secara maksimal.

Pusat daerah perkotaan yang berperan sebagai ibukota dianggap memiliki posisi yang paling strategis dibandingkan dengan daerah yang lainnya untuk meletakkan sarana prasarana. Posisi daerah ibukota juga dianggap merupakan daerah paling tengah dan paling adil untuk peletakan pusat pelayanan agar masing – masing daerah di dalam kecamatan dapat menjangkau untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dibandingkan dengan daerah yang lain, Kelurahan Banjarnegara dan Desa Leksana memiliki jumlah sarana prasarana yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya karena kedua daerah

ini merupakan ibukota kecamatan. Secara keseluruhan, kondisi sarana prasarana di Kecamatan Banjarnegara lebih baik dibandingkan dengan Karangobar.

Sistem perkotaan yang terdapat pada dokumen RTRW Kabupaten Banjarnegara menetapkan pusat kegiatan beserta dengan daerah pelayanannya. Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar memiliki daerah pelayanan yang berbeda – beda dengan letak pusat pelayanan yang berbeda (gambar 1.1).



Gambar 1.1 Pembagian daerah sistem perkotaan Kabupaten Banjarnegara

Sumber : Hasil olahan penulis

Hal tersebut berpengaruh terhadap daya jangkau yang harus ditempuh oleh penduduk yang ada di daerah sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Perbedaan jumlah sarana prasarana dan jumlah penduduk yang dilayani juga berpengaruh terhadap daya layan yang diberikan oleh masing – masing sarana prasarana terhadap penduduk yang dilayani.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan kepada narasumber dari pihak pemerintah dan juga kegiatan pengamatan langsung di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sarana prasarana di daerah yang digunakan secara bersama – sama oleh penduduk yang terdapat di daerah – daerah pelayanan (tabel 1.1)

Tabel 1.1 sarana prasarana yang digunakan secara bersama – sama

Sarana Prasarana
Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)
Rumah sakit
Terminal umum
Pasar
Sekolah

Sumber : Hasil wawancara narasumber

TPA sampah membutuhkan lokasi yang sangat luas untuk pengelolaannya sehingga keberadaan sebuah TPA dapat digunakan untuk beberapa daerah. Rumah sakit juga keberadaannya dapat digunakan untuk beberapa daerah di sekitarnya karena jumlah daya tampung yang dapat diberikan cukup banyak. Terminal kecil di masing – masing daerah saat ini rata – rata hanya melayani trayek beberapa titik saja, sehingga butuh terminal yang besar untuk menjangkau seluruh daerah. Pasar induk yang terdapat di pusat pelayanan keberadaannya juga sangat berdampak bagi kegiatan ekonomi lain yang berada disekitarnya, banyak penduduk yang memanfaatkan pasar di pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tingginya jumlah penduduk usia sekolah berdampak pada kebutuhan pelayanan pendidikan yang banyak dan memiliki mutu yang baik.

Daya jangkau sebuah sarana prasarana merupakan hasil perhitungan kemampuan penduduk yang berasal dari daerah pelayanan untuk menjangkau sarana prasarana yang berada di pusat pelayanan. Perhitungan kemampuan daya layan tersebut didasarkan pada jarak dan juga waktu tempuh dari masing – masing daerah. Perbedaan kondisi topografi dan ketersediaan jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap daya jangkau masing – masing sarana prasarana di pusat pelayanan untuk dijangkau oleh penduduk di daerah pelayanan.

Daerah – daerah pelayanan di PKL Banjarnegara rata – rata memiliki kemampuan daya jangkau yang lebih baik

dibandingkan dengan daerah pelayanan Karangkobar. Topografi yang datar di wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian selatan dan timur memudahkan pemerintah untuk membangun sarana prasarana di lokasi yang strategis dengan pola yang menyebar sehingga mudah dijangkau penduduk. Kondisi jaringan jalan yang baik juga memudahkan aksesibilitas penduduk untuk ke daerah lain. Kemampuan daya jangkau sarana prasarana di PKL Banjarnegara lebih tinggi karena jarak jangkau dan waktu tempuh yang dibutuhkan lebih pendek. Berbeda dengan daerah pelayanan di Karangkobar, daerah tersebut memiliki jarak jangkau yang lebih jauh untuk mencapai pusat pelayanan. Topografi wilayah di Kabupaten Banjarnegara bagian utara yang berbukit mengakibatkan jaringan jalan yang terbangun semakin panjang dan waktu tempuh yang diperlukan juga semakin lama. Pola permukiman yang mengelompok juga menyebabkan lokasi sarana prasarana yang tersedia juga lebih mengelompok di pusat kota saja. Hal tersebut mengakibatkan sarana prasarana di PKL-p Karangkobar memiliki daya jangkau yang lebih kecil dibandingkan Banjarnegara.

Penetapan sistem perkotaan yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara menggunakan jarak sebagai salah satu variabel yang paling diutamakan. Hal tersebut sama dengan teori *central place* yang dikemukakan oleh *Christaller*. Teori tersebut menetapkan sebuah daerah untuk dijadikan pusat pembangunan sarana prasarana untuk melayani penduduk di daerah sekitarnya (Tarigan, 2012). Pemusatan peletakan sarana prasarana tersebut memiliki dampak negatif, yaitu masing – masing penduduk di daerah pelayanan akan memiliki daya jangkau masing – masing tergantung dari jarak dan kondisi akses yang ada antara daerah dan pusat pelayanan. Hasil penelitian ini juga dapat menyanggah syarat – syarat yang dibuat oleh *Christaller* untuk menerapkan teori tersebut pada sebuah daerah. Teori

central place ini dapat diterapkan pada daerah yang bergelombang dan dengan penduduk yang tidak menyebar secara merata.

Selain perhitungan daya jangkau, kajian mengenai kemampuan daya layan suatu sarana prasarana juga penting untuk mengetahui perkembangan suatu daerah. Perhitungan daya layan yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat jumlah sarana prasarana yang tersedia di daerah pusat pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani di pada daerah pusat dan daerah pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan masing – masing sarana prasarana di pusat pelayanan dalam melayani kebutuhan penduduk apabila digunakan secara bersama – sama dengan daerah pelayanan yang ada di sekitarnya. Daerah pusat pelayanan yang baik akan memiliki jumlah sarana prasarana yang ideal sesuai dengan ketentuan daya tampung yang akan diberikan.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana yang terdapat di pusat pelayanan memiliki daya layan yang rendah sehingga belum efektif untuk melakukan pelayanan bagi penduduk di daerah pelayanan. Ketersediaan sarana prasarana yang sedikit bagi penduduk menjadi alasan ketidakefektifan tersebut. Jumlah sarana prasarana yang tersedia masih jauh dari jumlah sarana prasarana ideal yang harus tersedia bagi jumlah penduduk yang ada. Perhitungan tersebut dilakukan agar mengetahui apakah sarana prasarana yang terdapat di pusat sudah memenuhi jumlah standar yang seharusnya atau belum. Ketidakefektifan sarana prasarana yang saat ini tersedia di pusat pelayanan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada penduduk. Jumlah sarana prasarana di pusat pelayanan yang saat ini tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang harus dilayani. Penduduk saat ini masih memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di masing –

masing daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sarana pendidikan di Kecamatan Banjarnegara banyak diminati oleh penduduk, akan tetapi akibat kurangnya daya tampung yang tersedia dan sistem seleksi yang diterapkan oleh pemerintah maka masih banyak penduduk yang tidak dapat dilayani kebutuhan di daerah pusat. Bagi penduduk yang tidak terlayani pusat kota, mereka memanfaatkan sarana pendidikan di daerah asal atau daerah lain yang memiliki jenis sarana sesuai dengan tingkat mereka. Sarana kesehatan, berupa rumah sakit yang dimiliki oleh Banjarnegara sudah mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Saat ini RSUD tersebut keberadaannya masih menjadi rujukan bagi pasien untuk satu Kabupaten Banjarnegara. Belum tersedianya rumah sakit di Karangobar juga mendorong penduduk untuk menjangkau Banjarnegara apabila membutuhkan pelayanan rumah sakit. Selain rumah sakit, Karangobar juga belum menyediakan sarana peribadatan bagi penduduk yang memeluk agama Kristiani dan Kong Hu Cu. Penduduk masih harus menuju Banjarnegara untuk mendapatkan pelayanan peribadatan tersebut. Sarana peribadatan berupa mushola dan masjid sudah tersedia di masing – masing kelompok permukiman dalam jumlah yang lebih dari 1 buah. Keberadaannya sudah sangat mampu untuk melayani kebutuhan penduduk yang ada di sekitarnya. Pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang penting bagi sebuah daerah karena dapat mendorong pembangunan sarana prasarana lain yang ada di sekitarnya. Dari segi jumlah, pasar yang terdapat di Karangobar lebih mampu memenuhi kebutuhan penduduk daripada Banjarnegara. Banjarnegara hanya memiliki 6 unit pasar yang tersedia (BPS Kab. Banjarnegara, 2014), padahal dari jumlah ideal, Banjarnegara harus memiliki 12 unit pasar (hasil olahan penulis). Hal tersebut menyebabkan Banjarnegara masih kurang efektif melayani penduduk yang

ada di pusat dan daerah pelayanan. Saat ini Banjarnegara memiliki sebuah pasar induk yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam jumlah yang banyak.

Penetapan Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar sebagai pusat pelayanan bagi daerah – daerah yang ada di sekitar berdampak pada sarana prasarana yang terdapat di dalamnya. Semakin banyak penduduk yang harus terlayani maka daya tampung yang harus dimiliki oleh sarana prasarana harus semakin banyak atau jumlah ketersediaan sarana prasarana harus ditambahkan. Kegiatan evaluasi sarana prasarana wilayah dilakukan dengan melihat jumlah penduduk yang dilayani serta kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh sarana prasarana tersebut. Standar daya tampung yang digunakan dalam perhitungan adalah yang berasal dari SNI 03-1733-2004. Peraturan tersebut berisi tentang standar maksimal jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh sebuah sarana prasarana agar dapat melayani penduduk dengan baik. Kegiatan evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketercukupan jumlah sarana prasarana yang tersedia saat ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Hasil perhitungan kebutuhan sarana prasarana di Kecamatan Banjarnegara untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berjumlah 58.430 jiwa (BPS Kab. Banjarnegara, 2014) diketahui bahwa masih terdapat sarana prasarana permukiman yang jumlahnya belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Berikut adalah tabel 1.2 sarana prasarana yang keberadaannya belum mencukup standar jumlah minimal ketersediaan untuk melayani penduduk :

Tabel 1.2 sarana prasarana yang tidak cukup di Kecamatan Banjarnegara

Sarana prasarana
Sekolah TK
Sekolah SMA
Balai pengobatan
Rumah sakit bersalin

Sumber : Hasil olahan penulis

Bangunan sekolah TK sebenarnya harus tersedia di masing – masing kelurahan Banjarnegara untuk melayani penduduk usia sekolah dalam jumlah yang banyak. Keterbatasan lahan di daerah perkotaan Banjarnegara berdampak pada sulitnya penyediaan bangunan sarana pendidikan untuk penduduk, karena lahan yang ada digunakan untuk bangunan perumahan. Jenjang pendidikan SMA di Kota Banjarnegara memiliki mutu pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga banyak penduduk yang datang untuk memanfaatkan sarana pendidikan tersebut. Hal itu berdampak pada besarnya beban pelayanan sarana sehingga keberadaannya belum mampu melayani penduduk dengan maksimal. Berdasarkan data Kecamatan Banjarnegara dalam Angka tahun 2014, balai pengobatan hanya tersedia 3 unit dan rumah sakit bersalin terdapat 5 unit saja. Kekurangan jumlah sarana kesehatan tersebut saat ini sudah dapat terpenuhi dengan adanya puskesmas dan rumah sakit. Sarana peribadatan berupa langgar saat ini jumlahnya juga belum memenuhi. Keberadaan masjid di masing – masing kelompok permukiman yang sudah memenuhi jumlah standar maka kekurangan daya tampung langgar bagi penduduk dapat terpenuhi.

Berbeda dengan Kecamatan Karangobar, berikut adalah tabel 1.3 sarana prasarana yang keberadaannya belum mencukup standar jumlah minimal ketersediaan untuk melayani penduduk :

Tabel 1.2 sarana prasarana yang tidak cukup di Kecamatan Karangobar

Sarana prasarana
Sekolah TK, SMP, SMA
Balai pengobatan, rumah sakit, dan praktek dokter
Pertokoan dan koperasi
Langgar
Balai pertemuan dan pos hansip

Sumber : Hasil olahan penulis

Jumlah penduduk Karangobar yang harus dilayani di dalam kecamatan sejumlah 27.839 jiwa (BPS Kab. Banjarnegara, 2014). Jumlah tersebut

hanya setengah dari jumlah penduduk Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2014, akan tetapi masih terdapat sarana prasarana di daerah Karangobar yang jumlah ketersediaannya belum sesuai dengan standar minimal untuk melayani penduduk. Perbedaan hierarki perkotaan antara Banjarnegara dan Karangobar berdampak pada perbedaan jumlah sarana prasarana yang tersedia di dalam daerah.

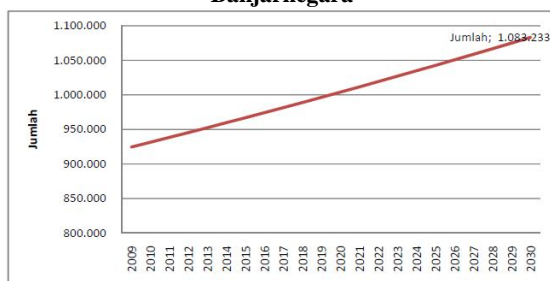
Kurangnya sarana prasarana pendidikan untuk melayani penduduk usia sekolah mengakibatkan banyak penduduk yang menuju ke daerah lain, khususnya ke Banjarnegara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Ketersediaan balai pengobatan dan praktek dokter juga belum memenuhi standar minimal, hal tersebut juga menyulitkan penduduk untuk melayani kesehatan, terlebih keberadaan rumah sakit juga belum tersedia di daerah ini sehingga tidak dapat menyangga kebutuhan penduduk. Bentuk permukiman yang mengelompok di bagian – bagian daerah tertentu menyebabkan pertokoan hanya tersedia di pusat kota saja dan tidak menyeluruh di seluruh daerah dengan jumlah yang banyak.

Jumlah penduduk yang harus dilayani di PKL Banjarnegara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk di PKL-p Karangobar. Penduduk di PKL Banjarnegara dan daerah pelayanan sejumlah 355.356 jiwa, sedangkan di PKL-p Karangobar dan daerah sekitarnya sejumlah 252.299 jiwa (BPS Kab. Banjarnegara, 2015). Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap daya tampung yang dapat diberikan oleh sarana prasarana kepada penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, saat ini sarana prasarana di dua daerah pusat pelayanan tersebut belum ada yang dapat melayani kebutuhan penduduk di tingkat kegiatan lokal. Jumlah sarana prasarana yang ada di Banjarnegara dan Karangobar belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimal yang harus tersedia untuk melayani penduduk dengan jumlah yang sangat banyak. Terdapat beberapa sarana prasarana yang saat ini

digunakan untuk melayani penduduk di daerah dan pusat pelayanan yang sudah memiliki jumlah yang sesuai dengan standar minimal, yaitu bank, rumah sakit, dan pasar.

Pemerintah memprediksikan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2030 jumlah penduduk di kabupaten terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 1.083.233 jiwa (Bappeda Kab. Banjarnegara, 2009). Berikut merupakan grafik 1.1 yang menggambarkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya :

Grafik 1.1 Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara



Sumber : (Bappeda Kab. Banjarnegara, 2009)

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya harus diiringi dengan penambahan jumlah pembangunan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini membuat rancangan sarana prasarana tambahan di pusat kegiatan lokal untuk melayani kebutuhan penduduk di masing – masing daerah pelayanan. Rencana sarana prasarana tambahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah sarana prasarana yang tersedia saat ini. Berikut adalah tabel 1.3 yang berisi tentang jenis sarana prasarana tambahan di dalam Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar:

Tabel 1.3 Rencana sarana prasarana yang akan ditambahkan

Sarana prasarana	
IPAL dan drainase	Jalan kolektor
Reservoir	STUM
Jaringan telekomunikasi	TPA
Terminal	Rumah sakit

Sumber : Pemerintah Daerah, 2011

IPAL, air bersih, dan drainase di kedua kecamatan tersebut sangat dibutuhkan oleh penduduk. Ketersediaan yang minim saat ini di permukiman menyulitkan penduduk untuk dapat membuang limbah dan mendapatkan air bersih. Limbah cair permukiman di Banjarnegara membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Kondisi topografi Karangobar yang berbukit menyulitkan penduduk untuk mendapatkan air bersih sehingga rencana penyediaan jaringan air bersih di daerah ini sangat membantu penduduk. Daerah Kabupaten Banjarnegara bagian utara saat ini juga belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Rencana penyediaan TPA di Karangobar oleh pemerintah harapannya dapat mengelola sampah penduduk dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Sebagai pendukung penetapan Kecamatan Karangobar sebagai PKL-p maka pemerintah merencanakan pengadaan rumah sakit dan terminal di daerah ini. Penyediaan rumah sakit tersebut dapat digunakan oleh penduduk di daerah pelayanan agar dapat menjangkau sarana prasarana kesehatan dengan lebih mudah lagi. Keberadaan terminal Karangobar yang saat ini sudah ada ditingkatkan kelasnya menjadi tipe C agar dapat melayani kebutuhan transportasi penduduk dengan lebih baik lagi. Sarana prasarana transportasi yang baik dapat mempermudah mobilitasi penduduk sehingga daerah bagian utara dapat lebih berkembang daripada saat ini.

KESIMPULAN

1. Kecamatan Banjarnegara dan Karangobar memiliki hierarki dan sistem perkotaan yang berbeda. Hal tersebut berdampak pada perbedaan jumlah ketersediaan, kondisi, dan kualitas dan sarana prasarana yang ada di dalam daerah. Sarana prasarana yang tersedia di Banjarnegara lebih banyak dibandingkan Karangobar

karena merupakan pusat dari pemerintahan kabupaten. Sarana prasarana Kecamatan Banjarnegara juga memiliki kondisi dan kualitas yang lebih baik sehingga dapat melayani penduduk lebih banyak.

2. Daya jangkauan yang dimiliki oleh sarana prasarana di PKL Banjarnegara juga lebih tinggi dibandingkan di PKL-p Karangobar. Penetapan sistem perkotaan menggunakan teori *central place* dengan variabel jarak dapat dilakukan di daerah ini. Daya layan yang diberikan oleh kedua PKL ini masih tergolong kurang efektif dengan sarana prasarana yang jumlahnya masih sangat sedikit.
3. Tingkat ketercukupan sarana prasarana di Banjarnegara dan Karangobar dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani, daya tampung sarana prasarana, dan jumlah ketersediaan saat ini. Beberapa sarana prasarana yang ada di kedua kecamatan tersebut jumlahnya sudah mampu melayani kebutuhan penduduk ditingkat kecamatan, tetapi apabila sarana prasarana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di pusat dan daerah pelayanan jumlahnya masih sangat kurang sehingga penduduk belum dapat terlayani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kab. Banjarnegara (2015). Kecamatan Banjarnegara dalam Angka 2014. Banjarnegara : Bappeda Kabupaten Banjarnegara
- BPS Kab. Banjarnegara (2014). Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2014. Banjarnegara : Badan Pusat Statistik kabupaten/Kota
- Bappeda Kab. Banjarnegara (2009). Laporan Antara (Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2030). Banjarnegara : Bappeda Kabupaten Banjarnegara
- Branch, Melville C (1995). Perencanaan Kota Komprehensif (diterjemahkan oleh Bambang Hari Wibisono). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Klug, Stefan dan Hayashi, Yoshitsugu (2012). Urban Sprawl and Local Infrastructure in Japan and Germany. *Journal of Infrastructure Systems* ASCE 18(4) : 232 - 241
- Kuswanto, Tjuk, dkk (2005). Perumahan dan pemukiman di Indonesia. Bandung : Penerbit ITB
- Martono, Nanang (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Massikki, Muhamad Najib (2005). Analisis ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Lingkungan Permukiman. *Metek. Tahun VII no. 3*
- Patilima, Hamid (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Pemerintah Daerah. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031
- Sarwono, Jonathan (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta
- Sukandarrumidi (2002). Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Tarigan, Robinson (2012). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara
- Yunus, Hadi Sabari (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta : Pustaka Pelajar